

PARTISIPASI POLITIK PONDOK PESANTREN SUNAN DRAJAT DALAM PEMILIHAN BUPATI LAMONGAN

TAHUN 2010

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Filsafat Politik Islam

OLEH :

NAILIS SA'ADAH
NIM : E04207016

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 4-2011 003 P1	No REG : 4-2011/P1/003 ASAL BUKU : TANGGAL :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS USHULUDDIN
PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM
SURABAYA
2011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nailis Sa'adah

NIM : E04207016

Fak : Ushuluddin

Prodi : Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Partisipasi Politik Pondok Pesantren Sunan Drajat Dalam Pemilihan Bupati Lamongan Tahun 2010”** adalah hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan plagiat. Apabila dikemudian hari diketahui kepalsuannya, kami bersedia untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Surabaya, 31 Januari 2011



NAILIS SA'ADAH

B. Relasi Santri, Kyai, dan Politik dalam Perspektif Teoritik.....	46
1. Teori hegemoni (Antonio Gramsci)	46
2. Teori otoritas (Max Webber).....	51

BAB III : SETTING PENELITIAN

A. Profil Pondok Pesantren Sunan Drajad.....	54
1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Sunan Drajad.....	54
2. Geografi Pondok Pesantren Sunan Drajad.....	59
3. Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Sunan Drajad.....	60
B. Partisipasi Politik Pondok Pesantren Sunan Drajad dalam	
Pemilihan Bupati Lamongan Tahun 2010	67

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Partisipasi Politik Pondok Pesantren Sunan Drajad dalam Pemilihan Bupati Lamongan Tahun 2010	75
B. Pengaruh Kyai dalam Mendorong Partisipasi Politik Santri di Pondok Pesantren Sunan Drajad Pada Pemilihan Bupati Lamongan Tahun 2010	81

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2010 merupakan kali kedua pemilihan Bupati (pilbup) secara langsung oleh semua warga yang berhak memilih. Partai mana dan siapa yang akan lolos dalam pilbup 2010, entah itu dari golongan yang beraliran Islam, nasionalis, sekuler, atau lainnya yang ada di negeri ini akan ditentukan oleh tiga hal. *Pertama*, pemahaman dan empati terhadap rakyat kebanyakan atau 'wong cilik' yang sering diberi label 'abangan'. *Kedua*, citra tokoh partai yang dekat dengan warga, berbahasa populis, menjanjikan harapan perubahan sekaligus menawarkan program yang konkret yang bisa dicerna publik. *Ketiga*, kemampuan membangun komunikasi dialogis dengan sekurangnya dua organisasi Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.¹

Organisasi NU dan Muhammadiyah biasanya lebih identik sebagai simbol perpolitikan kaum santri. Kecenderungan umum perpolitikan kaum santri, terutama yang tergabung dalam partai berlambang Islam atau berbasis pemeluk Islam lebih piawai menggunakan bahasa kitab formalistis dan normatif. Keyakinan bahwa Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pengetahuan memang tidak dapat diganggu gugat. Demikian pula keyakinan bahwa ajaran Islam yang tersusun dalam syariah telah mengatur tata kehidupan umat dan warga negara.

¹ Abdul Munir Mulkhan, *Politik Santri: Cara Menang Merebut Hati Rakyat*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 5

Dalam perkembangan sejarah, tradisi beberapa calon Bupati menggunakan strategi politik untuk memenangkan pemilihannya dengan melakukan pendekatan terhadap pondok pesantren. Pondok pesantren dalam bacaan teknis merupakan suatu tempat yang dihuni oleh para santri.² Pernyataan ini menunjukkan makna pentingnya ciri-ciri pondok pesantren sebagai sebuah lingkungan pendidikan integral. Sistem pendidikan pondok pesantren sebetulnya sama dengan sistem yang dipergunakan di Akademi Militer, yakni dicirikan dengan adanya sebuah bangunan beranda yang di situ seseorang dapat mengambil pengalaman secara integral.³ Menghadapi era modernisasi pada saat ini pesantren telah mengalami perkembangan luar biasa dengan variasi yang sangat beragam. Bahkan beberapa pesantren telah muncul dengan bangunan-bangunan fisik yang megah, membangun potensi-potensi santri (dari segi akhlak, nilai, intelek, spiritualitas) tetapi tidak hanya itu banyak juga pesantren yang lebih modern dengan merespon perkembangan dunia politik.

Pada awal rintisananya, pondok pesantren mempunyai tujuan yang jelas yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan *ubudiyah*. Di tengah perkembangan arus politik yang terjadi sekarang ini, pesantren pun seakan ikut

² Sa'id Aqiel Siradij, dkk, *Pesantren Masa Depan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 13

³ *Ibid.*, 13

merupakan modal sosial bagi tiap agenda politik nasional. Namun, tanpa agenda yang jelas, modal sosial tidak otomatis bisa digerakkan bagi tujuan-tujuan politik praktis, selain bisa berakibat runtuhnya pilar masyarakat madani.

Keterlibatan elite NU dan Muhammadiyah dalam pilpres segera mengundang perdebatan internal dalam hubungannya dengan kegiatan politik praktis. Kekalahan partai berbasis NU (PKB) dan Muhammadiyah (PAN) dalam pemilu legislatif, serta kegagalan kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu dalam pilpres, merupakan pendidikan politik. Politik santri yang normatif dan berbasis teologi mulai dikoreksi sosiologi politik yang lebih empiris dan realistik.

Penempatan komunitas Muslim sebagai mayoritas penduduk, jutaan warga NU dan Muhammadiyah sebagai kekuatan politik riil, disadari sebagai pandangan semu. Disadari, bahwa kultur keagamaan merupakan modal sosial yang bisa digerakkan untuk politik praktis jika dikembangkan komunikasi pragmatis bagi kepentingan mayoritas rakyat. Model komunikasi politik inilah yang mengantarkan para aktor demokrasi yang tak memiliki basis organisasional dalam gerakan Islam ke puncak kekuasaan.

Kesadaran politik itu mendorong elite santri memperhitungkan kembali peran politik yang bisa dimainkan bagi tujuan politik praktis. Kegiatan politik praktis lebih menarik karena hasilnya terukur dan segera bisa dinikmati. Berbagai kebijakan politik pada tingkat nasional atau daerah segera bisa dibuat pemerintah bersama DPR dan DPRD yang mengikat semua warga dan fasilitas hidup yang

bergantung pada Kyai, bukan saja saat hendak memilih jalan (ibadah) untuk menuju Tuhan-nya, melainkan juga saat memilih jalan politik untuk membangun dunianya, membangun masyarakat dan negaranya.

Kharisma Kyai yang dimiliki oleh para Kyai menyebabkan mereka menduduki posisi teratas pada kepemimpinan di lingkungannya. Selain sebagai pemimpin agama dan pemimpin masyarakat desa, Kyai juga memimpin sebuah pondok pesantren tempat ia tinggal. Di lingkungan pondok pesantren inilah Kyai tidak saja diakui sebagai guru mengajar pengetahuan agama, tetapi juga dianggap oleh santri sebagai seorang bapak atau orang tuanya sendiri. Sebagai seorang bapak yang luas jangkauan pengaruhnya kepada semua santri, menempatkan Kyai sebagai seorang yang disegani, dihormati, dipatuhi, dan menjadi sumber petunjuk ilmu pengetahuan bagi santri.

Kedudukan Kyai seperti itu, sesungguhnya merupakan *patron*, tempat bergantung para santri. Hubungan santri dan Kyai dianalogikan seperti hubungan murid dan guru di lingkungan tarekat. Karena kebiwaan Kyai, seorang murid enggan membantah apa yang dilakukan oleh Kyai.⁶ Kedudukan santri sebagai *client* bagi dirinya. Secara tidak langsung apabila Kyai sudah mempunyai pengaruh besar terhadap santri maka Kyai juga mempunyai dampak yang besar pula terhadap pondok pesantrennya.

Nilai-nilai yang terdapat di pondok pesantren bila kita cermati ternyata mengandung tiga unsur yang mengarah pada terbentuknya hubungan *patron-client*

⁶ Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1999), 78

bantuannya. *Ketiga*, Kyai politik yaitu pengasuh pondok pesantren yang senantiasa peduli pada organisasi politik dan juga pada kekuasaan. *Keempat*, kyai politik mitra kritis mirip dengan Kyai spiritual, tetapi ia memperhatikan dunia politik, dekat dengan umat, meletakkan kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang.

Salah satu pondok pesantren yang peneliti amati adalah pondok pesantren Sunan Drajad desa Banjaranyar, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan. Karena pondok pesantren Sunan Drajad ini kyai-Nya memberikan tawaran yang sesuai dengan tipologi kyai politik mitra kritis. Pondok pesantren ini juga pada waktu pilpres memberikan dukungan atau partisipasi politik yang berupa dukungan suara secara langsung dengan mendukung pasangan Megawati-Prabowo.

Dari pengalaman pilpres, maka pada saat pilbup Lamongan tahun 2010 pondok pesantren Sunan Drajad ini menjadi tempat startegis bagi para calon Bupati untuk berpartisipasi politik baik secara langsung, dalam artian memberi suara secara langsung dalam pemilihan Bupati. Ataupun partisipasi politik yang hanya mengkampanyekan calon Bupati tertentu.

Dari pemaparan di atas, maka peneliti tertarik kemudian memfokuskan pondok pesantren Sunan Drajad ini menjadi objek penelitian. Karena Pondok pesantren Sunan Drajad ini memiliki ciri khas selain pondok pesantren yang berbasis NU, kegiatan dalam pondok pesantren ini juga masih kental sama halnya

Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren Sunan Drajad karena sosio kultur pondok pesantren ini yang masih kental dengan pondok pesantren lama tetapi tidak mengingkari adanya masukan-masukan pengetahuan umum yang baru, termasuk juga dunia politik yang bergelut di dalamnya. Keadaan ini yang semakin menarik minat peneliti untuk meneliti lebih dalam bagaimana peran dan partisipasi pondok pesantren Sunan Drajad ini sehingga peneliti memilih judul **Partisipasi Politik Pondok Pesantren Sunan Drajad Dalam Pemilihan Bupati Lamongan Tahun 2010**

⁹ Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga), 17

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, selanjutnya akan dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi politik pondok pesantren Sunan Drajad pada pemilihan Bupati Lamongan tahun 2010?
2. Bagaimana peranan kyai dalam mempengaruhi partisipasi politik di lingkungan pondok Sunan drajad dalam pemilihan Bupati Lamongan tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan partisipasi politik pondok pesantren Sunan Drajad dalam pemilihan Bupati Lamongan tahun 2010.
2. Untuk memahami pola peranan kyai terhadap partisipasi politik santri di lingkungan pondok pesantren Sunan Drajad dalam pemilihan Bupati Lamongan tahun 2010.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini menambah kajian tentang studi keislaman terkait dengan pembahasan partisipasi politik pondok pesantren dalam pemilihan Bupati. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pemikiran politik Islam serta memperkaya varian, alternatif, dan rujukan sebagai khasanah referensi di masa yang akan datang terhadap peran pondok pesantren dalam percaturan politik. Selain itu, dapat juga sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan atau referensi serta menambah perbendaharaan kepustakaan bagi mahasiswa pada umumnya dan khususnya bagi program studi Politik Islam Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Ampel Surabaya.

E. Telaah Pustaka

Ada sejumlah kajian untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian yang terkait dengan peran pondok pesantren terhadap mobilisasi massa dalam pemilihan Bupati Lamongan tahun 2010, diantaranya:

1. Buku karangan Sa'id Aqiel Siradj, dkk. 1999. *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Pustaka Hidayah: Bandung. Buku ini menyajikan masalah-masalah pokok yang semestinya

pengelola, pengajar kitab kuning, sekaligus sebagai pemimpin. Ini berarti bahwa tradisi keagamaan pesantren yang berkembang dalam komunitas itu telah mampu membangun subkulturnya sendiri, yang cenderung terkesan tertutup dan eksklusif. Padahal pesantren merupakan bagian integral dari kultur masyarakat sekitarnya termasuk sistem pendidikan yang berlaku di dalamnya.

5. Buku karangan Syafiq Hasyim, dkk. 2010. Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan. Kompas: Jakarta. Buku ini menjelaskan persoalan yang dihadapi oleh NU dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan politik. Godaan politik praktis membayangi para elitnya. Melalui muktamar tahun 2010, NU berusaha melakukan refleksi atas peran yang telah dimainkan selama lima tahun sebelumnya dan mengagendakan perbaikan umat (kader dan jemaah) dalam konteks kebangsaan.
6. Buku karangan Pahmi Sy. 2010. Politik Pencitraan. GP Press: Jakarta. Politik pencitraan muncul sebagai akibat pesatnya arus informasi dan diberikannya hak-hak masyarakat untuk dapat memilih secara langsung pimpinan nasional dan daerah maupun wakil-wakilnya di lembaga legislatif secara langsung dengan sistem terbuka, apalagi dengan suara terbanyak.
7. Buku karangan Ramlan Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Gramedia Widiasarana: Jakarta. Buku ini membahas konsep-konsep dasar ilmu politik dan mendeskripsikan atas sejumlah konsep penting dalam ilmu politik. Selain

menentukan berhasil atau tidak sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. Untuk mengetahui informasi lebih dalam lagi maka peneliti menggunakan kyai, keluarga kyai, pengurus pondok pesantren, dan santri pondok pesantren laki-laki maupun perempuan yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan Bupati di desa Banjarwati.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya dengan maksud untuk menghimpun data penelitian.¹²

Metode observasi ini peneliti gunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan obyek studi penelitian. Selain itu juga untuk mendapatkan data tentang situasi dan kondisi secara umum di pondok pesantren Sunan Drajad, misalnya letak geografis pondok pesantren Sunan Drajad.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

¹² *Ibid.*, 142

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹³

Inti dari materi wawancara adalah persoalan bagaimana peran dan partisipasi politik pondok pesantren Sunan Drajad dalam pemilihan Bupati Lamongan 2010. Selain menanyakan masalah inti dari wawancara, pewawancara juga menanyakan sejarah pondok pesantren.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai sumber data dalam mengkaji objek penelitian. Dokumentasi juga menjadi data pelengkap yang biasanya berisi otobiografi, memoir, catatan harian, berita koran, artikel majalah, dan foto-foto, laporan pesantren dan notulensi rapat. Dokumentasi menjadi penting sebagai sumber primer penelitian. Sumber ini juga dapat mengungkapkan bagaimana subjek mendefinisikan dirinya sendiri, lingkungan, dan situasi serta tindakannya.¹⁴

5. Analisis Data

Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip Lexy J. Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya,

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133

¹⁴ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2003), 195

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.¹⁵

Secara operasional, ada beberapa tahapan analisis data menurut Matthew B. Miles & A. Michael Huberman yang dipertegas dalam bukunya Agus Salim,¹⁶ yaitu:

1. Reduksi Data

Digunakan sebagai suatu proses pemilih penyederhanaan, klasifikasi data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data lapangan. Reduksi data sudah dilakukan semenjak pengumpulan data. Reduksi dilaksanakan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data dan menelusuri dan menelusuri tema yang terbesar. Setiap data yang diperoleh disilang melalui komentar subyek penelitian yang berbeda untuk menggali informasi dalam wawancara dan observasi lanjut.

2. Penyajian Data

Merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada mulanya terpecah dan terpisah menurut sumber informasi dan saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*....., 248

¹⁶ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Jogjakarta: Jogjakarta, 2006), 22

3. Menarik kesimpulan

Menarik kesimpulan dilakukakn berdasarkan reduksi, intrepretasi penyajian data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dari hal-hal yang khusus sampai pada rumusan simpulan yang sifatnya umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sistematika pembahasan yang jelas, maka dalam skripsi ini penulis mencoba menguraikan isi kajian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Telaah Kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kerangka Konseptual dan Teoritik, terdiri dari; Konsep kyai, konsep santri, konsep pondok pesantren, definisi konsep partisipasi politik. Menjelaskan teori otoritas Max Weber dan teori hegemoni Antonio Gramsci sebagai gambaran partisipasi politik pondok pesantren.

- BAB III : Setting penelitian, terdiri dari; Profil pondok pesantren Sunan Drajad serta Partisipasi politik pondok pesantren Sunan Drajad dalam pemilihan Bupati Lamongan tahun 2010.
- BAB IV : Analisa data yang meliputi; Analisa partisipasi politik pondok pesantren Sunan Drajad dalam pemilihan Bupati Lamongan tahun 2010 dan Analisa peran kyai dalam mendorong partisipasi politik santri pondok pesantren Sunan Drajad pada pemilihan Bupati Lamongan tahun 2010.
- BAB V : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORITIK

A. Kerangka Konseptual

1. Konsep Kyai

Sebelum mendeskripsikan konsep Kyai, terlebih dahulu mendeskripsikan padanan Kyai yaitu ulama. Ulama secara etimologis '*alima*, yang berarti seseorang yang memiliki ilmu yang mendalam, luas dan mantap. Ulama secara terminologi ialah seseorang yang memiliki kepribadian dan akhlak yang dapat menjaga hubungan dekatnya dengan Allah dan memiliki benteng kekuatan untuk menghalau dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah SAW memberikan rumusan tentang ulama dengan sifat-sifatnya, yaitu bahwa ulama adalah hamba Allah yang berakhlak Qur'ani yang menjadi *warasatul anbiya*' (pewaris para nabi), *qudwah* (pemimpin atau panutan) bagi manusia.¹

Berdasarkan pengertian di atas dan pengertian yang diketengahkan oleh beberapa ulama antara lain Syeikh Muhammad Nawawi dari Banten Jawa Barat dalam kitabnya *Asmaul Husna* dan Sayyid Qutb dalam tafsirnya *fizilalil Qur'an* jilid VI jus XXII pada halaman 130. Maka musyawarah menetapkan pengertian ulama adalah hamba Allah yang memiliki jiwa dan

¹ Abdul Oodir Djaelani, *Peran Ulama dan Santri*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), 2

kekuatan tertentu, mengenal Allah dengan pengertian yang hakiki, pewaris Nabi, pelita umat dengan ilmu dan ketaqwaan istiqomah yang menjadi landasan baginya dalam beribadah dan beramal shaleh, selalu benar dan adil.²

Sementara Ali Maschan Moesa menjelaskan ulama atau Kyai adalah orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan agama, memiliki kesadaran ketaqwaan yang tinggi kepada Allah, mempunyai rasa keterikatan dengan lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam, dan mempunyai integritas moral yang diakui oleh masyarakat. Sebagai pemimpin Islam informal, Kyai adalah orang yang diyakini mempunyai otoritas yang sangat besar dan kharismatik. Hal ini karena Kyai adalah orang suci yang dianugerahi berkah.³

Menurut Weber, tipe otoritas ini berada diluar dunia kehidupan rutin dan profan sehari-hari. Maka Kyai dipandang mempunyai kelebihan-kelebihan luar biasa yang membuat kepemimpinannya diakui secara umum. Disamping kelebihan-kelebihan personalnya, otoritas Kyai ini dan hubungan akrabnya dengan anggota masyarakat telah dibentuk oleh kepedulian dan orientasinya pada kepentingan-kepentingan umat⁴ Islam.⁵

² *Ibid.*, 4

³ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), 1

⁴ Umat adalah institusi sosial yang universal yang didirikan atas semangat persatuan, saling tolong-menolong dan berbuat baik dalam rangka mencari ridho Tuhan. Konsep umat mengacu pada terminologi di Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu umat Islam di seluruh dunia ini merupakan umat yang satu.

⁵ *Ibid.*, 2

Horikoshi memposisikan Kyai dalam kehidupan masyarakat Jawa sebagai mediator, *cultural broker* atau pialang budaya. Jika posisi ini dilihat dari perspektif umat Islam tradisional Jawa, Kyai tergolong ke dalam kelompok elite agama. Keberadaan Kyai dengan posisinya sebagai elite agama, memiliki peran khas di tengah-tengah masyarakat, yaitu sebagai pemimpin spiritual. Posisi sebagai pemimpin spiritual itu biasanya diperoleh diperoleh melalui proses pewarisan.⁶

Dalam pandangan Kyai, kekuasaan merupakan kehendak Allah SWT sehingga kekuasaan sebagai amanah. Di sisi lain, kekuasaan itu membutuhkan pengakuan dari masyarakat, dan mempunyai implikasi moral. Cara mempertahankan kekuasaan menjadi isu sentral yang dilakukan melalui nasab, pilihan kitab kuning, ajaran tarekat, karomah dan barokah, keyakinan kalau tidak mematuhi Kyai akan mendatangkan malapetaka (*malati / kwalat*).⁷

2. Konsep Santri

Penggunaan istilah santri ditujukan kepada orang yang sedang menuntut pengetahuan agama di pondok pesantren. Sementara pemilik pondok pesantren disebut Kyai. Tidak semua Kyai memiliki santri, tetapi sebutan santri senantiasa berkonotasi mempunyai Kyai.⁸ Para santri menuntut pengetahuan agama kepada Kyai dan mereka bertempat tinggal di pondok

⁶ Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 29

⁷ Abd. Latif Bustami, *Kyai Politik: Politik Kyai*, (Malang: Pustaka Bayan, 2006), 16

⁸ Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1999), 97

pesantren. Karena posisi santri seperti ini, maka kedudukan dalam komunitas pesantren menempati status sosial subordinat, sedangkan Kyai menempati posisi superordinat.

Sementara pendapat lain menurut Abdurrahman Wahid, santri adalah siswa yang tinggal di pesantren guna menyerahkan diri. Ini merupakan persyaratan mutlak untuk memungkinkan dirinya menjadi anak didik Kyai dalam arti sepenuhnya. Dengan kata lain, ia harus memperoleh kerelaan sang Kyai dengan mengikuti segenap kehendaknya dan melayani segenap kepentingannya. Pelayanan harus dianggap sebagai tugas kehormatan yang merupakan ukuran penyerahan diri itu. Kerelaan Kyai ini yang dikenal di pesantren dengan nama *barakah* adalah alasan tempat berpijak santri di dalam menuntut ilmu dengan tekanan pada kebutuhan memperoleh kerelaan Kyai inilah diciptakan dalam pembentukan tata nilai di pesantren.

Menurut Nurcholis Madjid, ada dua pendapat yang bisa dipakai sebagai acuan untuk melihat asal-usul perkataan santri. Pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa santri berasal dari kata *sastri* dari bahasa Sansekerta, yang artinya melek huruf. Agaknya pada masa dahulu, lebih-lebih pada permulaan tumbuhnya kekuasaan politik Islam Demak, kaum santri adalah kelas *literary* (melek huruf) bagi orang Jawa. Ini disebabkan pengetahuan mereka tentang agama melalui kitab-kitab bertulisan Arab. Dari sini dapat diasumsikan bahwa menjadi santri berarti juga menjadi tahu agama melalui kitab-kitab yang dipelajari. Atau paling tidak seorang santri bisa

Pesantren itu terdiri dari lima elemen pokok, yaitu: Kyai, santri, masjid, pondok, dan pengajaran kitab-kitab Islam Klasik. Kelima elemen tersebut merupakan ciri khusus yang dimiliki pesantren dan membedakan pendidikan pondok pesantren dengan lembaga pendidikan dalam bentuk lain. Sekalipun kelima elemen ini saling menunjang eksistensi sebuah pesantren, tetapi Kyai memainkan peranan yang begitu sentral dalam dunia pesantren.¹³

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi adalah bahwa setiap orang mengetahui diri dan dunianya secara lebih baik dari pada orang lain termasuk para ahli elite politik yang membuat keputusan.¹⁴

¹³ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 63

¹⁴ Ardial, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: Indeks, 2010), 61

mempengaruhi hidupnya.¹⁵ Yang melakukan kegiatan politik adalah warga negara yang mempunyai jabatan pemerintahan. Dimana pemerintah merupakan pihak yang memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan keputusan politik, sedangkan masyarakat tidak mempunyai kewenangan dalam membuat keputusan politik. Masyarakat berhak untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan karena keputusan politik menyangkut kehidupan mereka.

Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam pelbagai arti, apakah partisipasi politik itu hanya perilaku, atau mencakup pula sikap-sikap dan persepsi-persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi perilaku partisipasi. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mendefinisikan partisipasi politik hanya sebagai kegiatan warga negara (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.¹⁶

Terdapat beberapa aspek dari definisi inti di atas. *Pertama*, ia mencakup kegiatan-kegiatan, tetapi bukan sikap. Sebaliknya pakar lain mendefinisikan partisipasi politik mencakup banyak orientasi para warga negara terhadap politik, serta perilaku politik mereka yang nyata. Pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan mengenai kompetisi dan keefektifan politik, persepsi tentang relevansi politik, itu semua seringkali

¹⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1992), 140

¹⁶ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 6

²² *Ibid.*, 13

²² *Ibid.*, 13

Partisipasi politik menurut Rosseau terdiri atas dua jenis. *Pertama*, para pengamat yang memperhatikan politik tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan di antara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum yang lain. *Kedua*, partisipasi aktif adalah khalayak yang bukan saja mengamati, tetapi giat melakukan komunikasi dengan para pemimpin politik atau politikus, baik di pemerintahan maupun di parlemen atau di luar parlemen.²³

Affan Gaffar menjelaskan, peran serta atau partisipasi politik warga masyarakat dapat dikategorikan dalam bentuk-bentuk yang berikut ini²⁴: *Electoral activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan pemilu. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta memberikan sumbangan untuk kampanye partai, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye partai politik, ikut mengambil bagian dalam kampanye atau *rally* politik partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih partai politik atas nama partai itu, memberikan suara dalam pemilu, mengawasi pelaksanaan pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan, dan lain-lainnya.

Lobbying, yaitu tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan mempengaruhi pejabat ataupun tokoh politik tersebut yang menyangkut

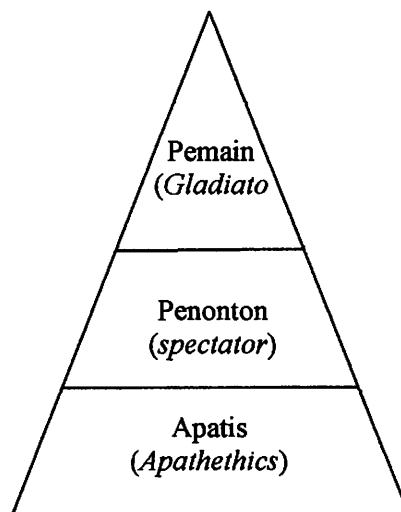
²³ Ardial, *Komunikasi Politik*, 66

²⁴ *Ibid.*, 63

gladiator. Artinya mereka yang secara aktif ikut terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.

Bagan 1

Piramida partisipasi politik



Sumber: Milbrath dan Goel dalam Miriam Budiharjo (2008:372)

- Pemain (*Gladiators*): 5-7% populasi termasuk gladiators, yaitu orang yang sangat aktif dalam dunia politik.
- Penonton (*Spectators*): 60% populasi aktif secara minimal, termasuk memakai hak pilihnya.
- Apatitis (*Apathetics*): 33% populasi termasuk *apathetic* yaitu orang yang tidak aktif sama sekali termasuk tidak memakai hak pilihnya.²⁵

²⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 372

Tabel 2.1 Bentuk-bentuk partisipasi politik

Konvensional	Non-Konvensional
Pemberian suara (voting)	Pengajuan petisi
Diskusi Politik	Berdemonstrasi
Kegiatan kampanye	Konfrontasi
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Mogok
Komunikasi dengan pejabat politik dan administrasi	Tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran) Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) Perang gerilya

Sumber: Gabriel A. Almond dalam Mochtar Mas'od dan Collin Mc Adreus (1991: 47)

²⁶ Khoirul Anwar & Vina Salvina, *Dasar Perilaku Politik dan kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004*, (Malang: UMM Press, 2006), 19

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang.²⁸ *Pertama*, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. *Kedua*, menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat

²⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 144

dan politik tempat dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah.

Kedua faktor-faktor yang berdiri sendiri (bukan variabel yang independen). Artinya, tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud dengan status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, pekerjaan. Yang dimaksud dengan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran, ataupun pemilikan benda-benda berharga. Seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah.²⁹

6. Perilaku Politik

Perilaku politik menjadi bagian dari salah satu perilaku-perilaku yang lain. Seperti perilaku ekonomi, perilaku keagamaan, dan sebagainya. Perilaku yang menyangkut persoalan politik adalah perilaku politik. Sejalan dengan pemahaman politik, perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan

²⁹ *Ibid.*, 145

Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Adapun dalam kategori individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warga negara biasa.³⁰ Yang dimaksud dengan agregasi ialah individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan, dan bangsa, sedangkan yang dipelajari dalam tipologi kepribadian politik ialah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, *machiavelist*, dan *democrat*. Kajian terhadap perilaku politik sering kali dijelaskan dari sudut psikologik di samping pendekatan struktural fungsional dan struktural konflik. Berikut ini diuraikan sebuah model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik yang merupakan kombinasi ketiga pendekatan tersebut.

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik.³¹ *Pertama*, lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa. *Kedua*, lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Dari

³⁰ *Ibid.*, 132

³¹ *Ibid.*, 132

Pemahaman terhadap perilaku politik individu atau sekelompok individu membutuhkan sudut pandang yang multidimensi. Ini berarti faktor-faktor yang mendorong perilaku politik tidak bersifat determinan, tetapi bersifat memberikan pengaruh. Untuk memahaminya, menurut Nazaruddin Syamsudin yang pertama dipahami dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik adalah konteks latar belakang historis. Sikap dan perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh proses-proses dan peristiwa historis masa lalu dan sekaligus merupakan kesinambungan yang dinamis.

Sebagai perwujudan sikap politik, perilaku politik tidak dapat dipisahkan dari budaya politik. Budaya politik dipahami secara fungsional menentukan perilaku politik, seperti karya Almond dan Verba. Almond dan Verba menjelaskan bahwa budaya politik merupakan pola sikap dan orientasi

2. Orientasi afektif atau perasaan tentang sistem politik, peranan, para aktor, dan penampilan.
3. Orientasi evaluatif menunjuk kepada keputusan dan pendapat warga negara tentang obyek-obyek politik berdasarkan apa yang ia ketahui dan ia rasakan terhadap sistem politik maupun perilaku aktor-aktor politiknya.

Jika dilihat dari tingkat dan kedalaman orientasi tiap-tiap warga negara, maka budaya politik dapat digolongkan menjadi tiga tipe, yakni budaya politik parokial, budaya politik subyek, dan budaya politik partisipan.³⁴ Budaya politik parokial menunjuk pada tingkat yang paling rendah jika dihubungkan dengan tingkat orientasi politik warga negara. Seorang warga negara yang tidak memiliki orientasi sama sekali terhadap ke empat aspek dari sistem politik tersebut tergolong dalam tipe kebudayaan parokial.

Selanjutnya seseorang yang lebih kurang memiliki orientasi politik khususnya terhadap aspek sistem politik secara keseluruhan dan aspek outputnya, digolongkan dalam tipe kebudayaan subyek. Akhirnya tingkat yang paling tinggi dari orientasi warga negara terhadap ke empat aspek sistem politik secara keseluruhan digolongkan dalam tipe kebudayaan politik partisipan. Seseorang yang memiliki kebudayaan politik partisipan lebih menunjukkan sikap dan perilaku yang proporsional serta bertanggung jawab dalam berhadapan-hadapan dengan sistem politik.

³⁴ *Ibid.*, 11

B. Relasi Santri, Kyai, dan Politik dalam Perspektif Teoritik

1. Teori hegemoni (Antonio Gramsci)

Antonio Gramsci, seorang *Italian* (1891-1937), merupakan pemikir Neo-Marxist terkenal. Gramsci telah menulis karya-karya yang terkenal. Pada umumnya karya-karya Gramsci terbagi dua. *Pertama*, pemikirannya pada saat aktif berpolitik yang tersebar di berbagai media. *Kedua*, lebih dari tiga puluh *notebooks* yang berisi sejarah dan analisisnya selama di penjara. Tulisannya ini dikenal dengan nama *Prison Notebooks*, yang berisi sejarah Italia dan nasionalisme, juga idenya dalam teori kritis dan pemikiran tentang pendidikan. *Pertama*, hegemoni kultural. *Kedua*, perlunya pendidikan untuk kelas pekerja dalam mengembangkan lahirnya cendekiawan dari kelas pekerja.

Hegemoni kultural Gramsci berusaha untuk menjelaskan, mengapa prediksi atas adanya revolusi komunis dalam era industri di Eropa tidak pernah terjadi. Resesi dan sejumlah kontradiksi atas kapitalisme tersebut akan menyebabkan berlimpahnya massa, yakni orang-orang dari kelas pekerja untuk mengembangkan organisasi seperti serikat buruh dan partai politik sebagai langkah pembelaan diri. Resesi dan kontradiksi yang berkelanjutan tersebut akan menggulingkan kapitalisme dalam suatu revolusi dan merestrukturisasi institusi ekonomi, politik, dan sosial dalam model sosialis-rasional yang kelak akan melahirkan masyarakat komunis.

sosial mendominasi kelompok-kelompok oposisi untuk menghancurkan atau menundukkan mereka, bahkan mungkin dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Di lain pihak, kelompok sosial memimpin kelompok-kelompok kerabat dan sekutu mereka. Sebuah kelompok sosial dapat dan bahkan harus sudah menerapkan kepemimpinan sebelum memenangkan kekuasaan pemerintahan.³⁸ Kelompok sosial tersebut kemudian menjadi dominan ketika dia mempraktekkan kekuasaan, tetapi apabila dia telah memgang kekuasaan penuh di tangannya, dia masih harus terus memimpin juga.³⁹

"Setiap negara adalah etis sejauh fungsi terpentingnya adalah membangkitkan seluruh jumlah massa yang besar itu kepada tingkat tertentu dari moral dan kebudayaan, suatu tingkat yang berhubungan dengan kebutuhan dari kekuatan produktif, dan hingga kepentingan dari klas yang berkuasa".

⁴¹ Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*

Cara untuk menumbangkan hegemoni yang dominan, tidak hanya berupa kekerasan saja, namun juga berupa aktivitas politik. Gramsci mengusulkan dua bentuk strategi politik dalam mencapai garis besar dari hegemoni yang berkuasa dan pembentukan masyarakat sosialis:

- a. *War of Manoeuvre*: Karakteristiknya adalah serangan yang frontal, bertujuan untuk meraih kemenangan secara cepat, dan khususnya ditujukan kepada masyarakat dengan kekuasaan negara yang dominan dan terpusat serta gagal dalam membangun hegemoni yang kuat dalam *civil society*.
- b. *War of Position*: Karakteristiknya adalah perjuangan yang panjang. Pertama menyangkut institusi dari suatu *civil society*, kedua kaum sosialis mengambil kendali melalui perjuangan kultural dan ideologis dibandingkan persaingan ekonomi dan politik, ditujukan khususnya untuk masyarakat liberal-demokratis dengan kekuatan negara yang lemah, namun hegemoni yang lebih kuat.

Menurut Webber tipe ideal birokrasi itu mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Istilah rasional dengan segala aspek pemahamannya merupakan kunci dari konsep ideal birokrasi Weberian. Rasionalitas dan efisiensi dicerminkan dengan susunan hierarki adalah khusus merupakan kebutuhan yang amat mendesak pada saat itu. Dengan demikian ukuran rasionalitas dan efisiensi amat berbeda dengan kriteria untuk organisasi zaman modern sekarang ini yang kondisinya tidak sama dengan zamannya Max Webber.⁴⁷

⁴⁷ Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 19

orang yang disebut dengan nama santri yang dengan tekun mempelajari dan mengkaji Al-Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab lain dalam jangka waktu yang cukup lama.

Lokasi Pondok Pesantren Sunan Drajat berada di desa Banjarwati, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan. Menilik dari namanya, memang Pondok Pesantren ini mempunyai ikatan historis, psikologis dan filosofis yang sangat lekat dengan nama Kanjeng Sunan Drajat. Sunan Drajat adalah julukan dari Raden Qosim putra kedua dari Raden Ali Rahmatullah (Sunan Ampel) dengan Nyi Ageng Manila (putri Arya Teja, Adipati Tuban). Pada sekitar tahun 1440-an, Syahdan seorang pelaut muslim asal Banjarmasin, Kalimantan Timur mengalami musibah di pesisir pantai utara. Kapal yang ditumpangnya pecah terbentur batu karang dan kapal itu pun karam. Sang pelaut muslim asal Banjar (Banjarmasin, Kalimantan Timur) mengalami musibah di pesisir pantai utara. Kapal yang ditumpangnya pecah terbentur batu karang kapal dan kapal itupun karam. Sang pelaut muslim terdampar di tepian pantai Jelag (sebuah dusun disebelah utara Banjaranyar paciran lamongan) dan ditolong oleh mbah Mayang Madu, penguasa kampung Jelag saat itu. Selanjutnya sang pelaut muslim untuk sementara tinggal bersama mbah Mayang Madu dimana kondisi masyarakat pada waktu itu sangat memprihatinkan. Kehidupan

menyiarkan ajaran Islam. Maka berangkatlah Raden Qosim menuju kampung Banjaranyar. Perjuangan beliau dimulai dengan mendirikan Pondok Pesantren disuatu petak tanah yang terletak sekitar 200 m dari tepian pantai Banjarnayar yang sekarang dipakai lokasi Pondok Pesantren putri Sunan Drajat. Beliau pun mengatakan bahwa barang siapa yang mau belajar dan mendalami ilmu agama ditempat tersebut, semoga Allah menjadikannya manusia yang memiliki derajat luhur. Karena doa Raden Qosim inilah para pencari ilmu berbondong-bondong belajar di tempat beliau dan Raden Qosim pun mendapat gelar Sunan Drajat. Sementara itu untuk mengenang perjuangan mbah Banjar maka dusun yang sebelumnya bernama kampung Jelag diganti namanya menjadi Banjaranyar karena mengabadikan nama mbah Banjar dan anyar sebagai suasana baru sebagai petunjuk Islam. Setelah beberapa lama beliau berdakwah di Banjaranyar maka mengembangkan Daerah dakwahnya dengan mendirikan masjid dan Pondok Pesantren yang baru di kampung Sentono. Beliau berjuang hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di belakangh masjid tersebut. Kampung di mana beliau mendirikan Pondok Pesantren dan masjid tersebut akhirnya dinamakan pula sebagai desa Drajat. Sepeninggal kanjeng Sunan Drajat tongkat estafet perjuangan diteruskan oleh anak cucu Sepeninggal

³ *Ibid.*, 4

Pesantren Sunan Drajat kembali menata diri dan menatap masa depannya dengan rasa optimis dan tekad yang kuat.⁴

pengembangan agrobisnis 30 Ha, dan tanah wali santri/ alumni yang digunakan untuk pengembangan usaha 300 Ha.⁷

Mengenai kondisi fisik pondok pesantren Sunan Drajat pada umumnya baik. Sarana transportasi untuk menjangkau pondok pesantren Sunan Drajat ini relatif mudah, banyak transportasi yang bisa digunakan untuk sampai di pondok pesantren Sunan Drajat. Sarana komunikasi dan penerangan bukan menjadi masalah lagi bagi pondok pesantren Sunan Drajat, karena pondok pesantren Sunan Drajat termasuk pondok pesantren yang bukan lagi berada di wilayah terpencil. Meskipun letak pondok pesantren Sunan Drajat ini berada di desa kecil, tetapi letak desa Banjarwati ini sudah termasuk wilayah yang cukup ramai, sehingga sarana dan prasarana mudah terpenuhi.

3. Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Sunan Drajat

a. Keadaan Santri, Kyai, dan Guru/ *Ustadz*

Santri/ siswa yang belajar di Pondok Pesantren Sunan Drajat berjumlah 9000 terdiri dari santri putra mukim 2000, santri putri mukim 1900 orang, santri karyawan 300, santri tidak menetap 4800. Asal santri dari sekitar Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Jombang, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Jakarta, Jawa tengah,

⁷ Arsip tentang profil pondok pesantren Sunan Drajat, 5

b. Perkembangan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Sunan Drajat

⁸ Arsip tentang profil pondok pesantren Sunan Drajat, 4

Kini, Pondok Pesantren Sunan Drajat telah memiliki berbagai pendidikan, baik formal maupun non-formal dalam bermacam jenjang, seperti : TK, MI, MTs, SLTPN 2 Sunan Drajat Paciran, Madrasah Aliyah, Madrasah Mu'allimin Mu'allimat, SMK NU 1 (STM), SMK NU 2 (SMEA), sekolah usaha perikanan menengah (SUPM), Unisla kampus IV, Madrasah diniyah, dan Madrasatul Qur'an dengan jumlah peserta didik 8.000 orang. Semua itu tidak lepas dari berbagai terobosan dan upaya yang dilakukan untuk menjadikan Pondok Pesantren Sunan Drajat sebagai pesantren *Rahmatal Lil 'Allamin*.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, 3

kehidupan masyarakat. Di bawah ini adalah tabel yang menerangkan perkembangan Pondok Pesantren Sunan Drajat dari tahun ke tahun :

**Tabel 3. 1 Perkembangan pendidikan Pondok Pesantren Sunan
Drajat**

TAHUN	KETERANGAN
1966	Sebelum kebangkitan Pondok Pesantren Sunan Drajat, di Banjarnayar telah berdiri lembaga pendidikan MI Al-Mu'awanah
1976	Madrasah diniyah didirikan mengawali upaya dibangkitkannya Pondok Pesantren Sunan Drajat
1977	Pondok Pesantren Sunan Drajat secara resmi didirikan kembali pada tanggal 07 September 1977
1983	Pesantren berupaya mendirikan SMP 45, namun kurangnya minat pendidikan ini hanya mampu bertahan 3 tahun selanjutnya diganti dengan MTs Al-Mu'awanah
1986	MTs Al-Mu'awanah berdiri dengan izin Akte izin pendiri No.B. 30008148 tanggal 1 Juli 1986
1991	MA Ma'arif 7 berdiri dengan izin Akte pendiri No.wm.06.04/.pp.0.3.2/001399/191 pada tanggal 08 April 1991
1994	Madrasah Mu'allimin Mu'allimat berdiri dengan materi kurikulum nasional dengan ditambahkan muatan agama likal lebih banyak
1995	SMK NU-1 berdiri dengan akte izin pendirian nomor 1942/32. B tertanggal 17 Juli 1995
1996	Madrasatul Qur'an berdiri pada tanggal 01 Juli 1996 dengan

B. Partisipasi Politik Pondok Pesantren Sunan Drajat dalam Pemilihan Bupati Lamongan Tahun 2010

Pemilihan Bupati langsung merupakan salah satu faktor penting bagi upaya terciptanya kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pemilihan bupati atau biasa dikenal dengan istilah Pemilu Kepala Daerah merupakan prosedur yang ditempuh oleh masyarakat demi mendapatkan keputusan politik, yaitu eksekutif daerah. Melalui sebuah proses pemilihan yang bersifat kompetisi di antara calon-calon yang mencalonkan diri. Proses ini dilakukan demi mencapai kesepakatan dari seluruh masyarakat yang ikut memberikan suaranya, di mana suara terbesar akan menjadi bupati dan wakil bupati. Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah merupakan salah satu mekanisme yang tepat untuk memfasilitasi para Calon Bupati dan Wakil Bupati bersaing untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebagai bagian dari warga negara di negeri ini, partisipasi politik santri Pondok Pesantren Sunan Drajat pada pemilu Kepala Daerah Lamongan tahun 2010 merupakan satu keniscayaan. Bagaimanapun santri adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai hak secara mutlak untuk memberikan suaranya dalam pemilu Kepala Daerah Lamongan tahun 2010 tersebut. Tabel di bawah menunjukkan bahwa jumlah santri ponpes Sunan Drajat terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap pemilu Kepala Daerah:

**Tabel 3. 2 hasil rekapitulasi data pemilih santri Pondok Pesantren Sunan
Drajat dan wilayah kelurahan Banjarwati**

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jumlah santri yang terdaftar dalam DPT	610	542	1152
2.	Jumlah santri yang memberikan suaranya	610	542	1152
3.	Jumlah santri yang tidak memberikan suaranya	0	0	0
4.	Jumlah semua pemilih yang terdaftar di DPT	2642	2649	5291
5.	Jumlah semua pemilih terdaftar yang memberikan suaranya	1875	2003	3878
6.	Jumlah semua pemilih terdaftar yang tidak memberikan suaranya	2642	2649	1413

Sumber: Data berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu kepala daerah tahun 2010 di kelurahan Banjarwati dan data administrasi santri ponpes Sunan Drajat 2010¹³

Jika dilihat dari tingkat partisipasi pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, maka tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih laki-laki dan pemilih perempuan santri Pondok Pesantren Sunan Drajat terlihat relatif berimbang.

¹³ PPK di kecamatan Paciran tahun 2010

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Partisipasi Politik Pondok Pesantren Sunan Drajat dalam Pemilihan Bupati

Lamongan Tahun 2010

Pemilu Kepala Daerah merupakan salah satu mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memungkinkan terlaksananya demokrasi secara prosedural dengan rekrutmen politik yang bersifat terbuka. Sebuah rekrutmen politik berarti merujuk pada proses pemilihan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Hal ini berarti Pemilu Kepala Daerah menjadi proses politik untuk merekrut anggota masyarakat yang dipandang mempunyai kemampuan untuk menjadi Bupati dan Wakil bupati.

Partisipasi individu warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang jelas akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan individual dan sosial dalam masyarakat. Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah menuntut partisipasi masyarakat secara mutlak. Warga negara secara eksplisit mempunyai hak untuk ikut serta menggunakan hak tersebut dalam memberikan suaranya pada pemilu Kepala Daerah. Secara teoritis partisipasi adalah keikutsertaan warga Negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut hidup rakyat. Meskipun masyarakat tidak mempunyai kewenangan

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, dalam hal ini warga pondok pesantren Sunan Drajat seolah tidak mau kalah dengan keikutsertaan dalam mengambil hak mereka pada pemilu Kepala Daerah Lamongan tahun 2010. Partisipasi politik warga pesantren dipercaya bisa mempengaruhi tingkat suara yang lebih tinggi. Hal itu memang terbukti pada partisipasi politik Pondok Pesantren Sunan Drajat, di mana para santri memberikan partisipasi politiknya dalam pemilu Kepala Daerah Lamongan tahun 2010. Pada pemilu Kepala Daerah Lamongan tahun 2010 ada empat calon bupati dan wakil bupati, salah satunya adalah pasangan Tsalits Fahami-Subagio yang mendapat dukungan dari pondok pesantren Sunan Drajat.

Pada pemilu Kepala Daerah Lamongan tahun 2010 partisipasi santri sangat diperlukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut untuk memperoleh suara yang tinggi. Kenyataannya, partisipasi politik santri pondok

pesantren Sunan Drajat ini memang tinggi, dibuktikan dengan adanya pemberian suara mereka dalam pemilu Kepala Daerah Lamongan tahun 2010 dan terdaftar di TPS 06 dan TPS 07 di kelurahan Banjarwati. Jumlah DPT di pondok pesantren Sunan Drajat sejumlah 1152 semua santri pun memberikan suara mereka dengan baik artinya tidak ada satu pun santri yang golput. Dari hasil penghitungan suara pun calon pasangan yang diusung pondok pesantren Sunan Drajat lebih unggul dibandingkan dengan calon pasangan bupati dan wakil bupati yang lain.

Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. *Pertama*, apatis, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua*, spektator, artinya orang yang setidaknya-tidaknnya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga*, gladiator, artinya mereka yang secara aktif ikut terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.

Para Santri di Pondok Pesantren Sunan Drajat termasuk mempunyai tingkat partisipasi yang aktif, karena telah memberikan hak suara pada pemilu Kepala Daerah tahun 2010. Angka yang lebih unggul di kelurahan Banjarwati khususnya pada TPS 06 dan TPS 07 membuktikan partisipasi yang aktif. Secara teoritis santri pondok pesantren Sunan Drajat sesuai dengan tipe spektator, karena makna dalam teori ini adalah orang yang setidaknya-tidaknnya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Walaupun pada kenyataannya masih ada beberapa santri yang tidak mengerti dengan adanya politik pada umumnya, dan pemilu Kepala Daerah pada khususnya. Mereka yang kurang mengerti dengan adanya politik

Hal ini sesuai dengan teori Hegemoni yang dibawa oleh Gramsci, di mana hegemoni merupakan kepemimpinan kultural yang dibawa oleh kelas penguasa. Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas dibawahnya dengan cara-cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus.¹

Konsep hegemoni Gramsci sebenarnya dapat dielaborasi melalui penjelasannya tentang basis dari supremasi kelas. Supremasi sebuah kelompok mewujudkan diri dalam dua cara, sebagai dominasi dan sebagai kepemimpinan

² Malati adalah sesuatu yang dianggap sakral apabila sesuatu yang sakral tersebut dilanggar maka akan berdampak negatif pada dirinya sendiri

Sebagai buktinya yaitu hasil suara calon Bupati dan calon wakil Bupati yang unggul di kelurahan Banjarwati, merupakan pasangan Tsalits Fahami-Subagio. Kedua pasangan calon ini merupakan kandidat yang diinstruksikan Kyai di Pondok Pesantren Sunan Drajat untuk dipilih. Kyai tidak dengan secara langsung memberikan intruksi kepada santrinya, namun diperantarakan lewat pengurus pondok untuk di koordinir dan disampaikan kepada para santri.

Suara Sah

Sumber: data berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu kepala daerah tahun 2010 di kelurahan Banjarwati⁵

Santri dalam khasanah kehidupan bangsa Indonesia dan khususnya umat Islam mempunyai dua makna. *Pertama*, merujuk pada sekelompok pelajar sebuah pendidikan di pondok pesantren. *Kedua*, merujuk akar budaya kelompok pemeluk Islam. Penelitian ini menekankan pemahaman santri pada makna yang pertama yaitu santri yang merupakan sekelompok pelajar sebuah pendidikan di pondok pesantren.

⁵ PPK di kecamatan Paciran tahun 2010

pengabdian kepada Kyainya. Dengan kata lain, seseorang yang menjadi santri harus patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Kyai. Dalam kasus di pondok pesantren Sunan Drajat, mereka yang dianggap Kyai ini hanyalah seorang yaitu Abdul Ghofur yang juga merupakan pengasuh utama dan mempunyai kekuasaan terbesar di Pondok Pesantren Sunan Drajat karena beliau juga masih mempunyai garis keturunan dengan Raden Qosim alias Sunan Drajat. Abdul Ghofur mempunyai karakter yang kuat, disiplin dalam mendidik santri, sehingga dapat menjadi panutan bagi semua santri. Meskipun Abdul Ghofur tidak terjun langsung dalam politik praktis, tetapi kiprahnya di dunia politik sudah tidak diragukan lagi. Beliau sering berinteraksi dengan dunia luar meskipun tujuan akhirnya sebenarnya untuk pengembangan pondok pesantren Sunan Drajat. Abdul Ghofur merupakan sosok yang kharismatik dan fenomenal, sehingga bisa mempengaruhi santri-santri di pondok pesantren Sunan Drajat khususnya dan juga masyarakat di sekitar pondok pesantren Sunan drajat pada umumnya.

Pengaruh nyata dari Abdul Ghofur memberikan dampak terhadap hasil suara dalam Pemilu Kepala Daerah Lamongan tahun 2010 yang ada di kelurahan Banjarwati. Para santri memberikan hak suaranya kepada Calon Bupati yang telah diinstruksikan oleh Abdul Ghofur. Beliau memberikan instruksi kepada santrinya dengan cara memberikan *tausiyah* dan juga meenginstruksikan kepada pengurus Pondok Pesantren Sunan Drajat untuk mengkondisikan para santri. Namun, Kyai tidak serta merta untuk mengikuti apa yang telah diinstrusikannya. Beliau tetap mengembalikan pilihan penuh kepada santrinya.

Banyak pasangan calon Bupati dalam pemilihan Kepala Daerah yang *sowan* untuk meminta restu pada Kyai. Namun KH. Abdul Ghafur secara tidak langsung lebih cenderung memilih pasangan Tsalits Fahami-Subagio. Hal ini disebabkan Tsalits Fahmi adalah alumni dari Pondok Pesantren Sunan Drajat, yang tentunya ikatan antara anak dan ayah lebih kuat dari pada yang lainnya. Dengan dimenangkannya pasangan Tsalits Fahami-Subagio, pastinya akan mengangkat pamor dari Pondok Pesantren Sunan Drajat yang mempunyai putra didik yang mampu menjadi seorang Bupati. Pengaruh dari KH. Ghofur kepada santrinya terbukti pada hasil suara pemilu Kepala Daerah Lamongan tahun 2010. Hal ini terbukti dengan dimenangkannya pasangan Tsalits Fahami-Subagio sebagai pemenang.

**Tabel rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Kepala Daerah
Lamongan tahun 2010 di kelurahan Banjarwati**

Suara Sah

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Suara
1.	Drs. H. M. Tsalits Fahami dan H. Subagio, SE	2830
2.	Ongki Wijaya Ismail Putra, ST. dan H. Basir Sutikno	58
3.	H. Fadeli dan Amar Saifudin	812
4.	Ir. H. Suhandoyo dan Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM.	130

Sumber: data berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu Kepala Daerah tahun 2010 di kelurahan Banjarwati⁶

⁶ PPK di kecamatan Paciran tahun 2010

Tipe otoritas tradisional didasarkan atas tradisi, adat istiadat, atau perasaan spontan para pengikut. Selain itu, dalam tipe tradisional juga seseorang bisa menjadi pemimpin karena ada silsilah garis keturunan yang menjadikan seseorang tersebut dianut dan disegani banyak orang.⁷ Hal ini juga sesuai dengan Abdul Ghofur yang mendapat simpati dari santri dan masyarakat, karena beliau mempunyai garis keturunan dengan Raden Qosim atau Sunan Drajat. Sehingga santri pondok pesantren Sunan Drajat dan masyarakat sekitar menganggap Abdul Ghofur mempunyai banyak persamaan dengan Sunan Drajat, diantaranya Abdul Ghofur mempunyai keahlian dalam bidang agama yang sama juga dimiliki oleh Sunan Drajat.

⁷ Zainuddin Maliki, *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik*, 38

⁸ *Ibid.*, 38

Sumber: Data berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu kada tahun 2010 di kelurahan Banjarwati¹⁰

Sebenarnya Kyai Ghofur tidak memaksakan pilihan kepada santri, tetapi Kyai Ghofur hanya memberikan instruksi saja. Untuk pilihan tetap dikembalikan seutuhnya kepada santri. Tidak ada banyak cara untuk mempengaruhi para santri yang dilakukan oleh Abdul Ghofur, beliau hanya mengandalkan kharisma dan wibawa yang dimilikinya saja. Seperti ungkapan salah satu santri putra:

"... .. Saya sendiri masih melihat calon-calonnya siapa mbak, tetapi berhubung saya ini santri ya saya hanya mengikuti apa yang didawuhkan abah. Karena saya meyakini kalau pilihan abah itu sudah benar... .." ¹¹

Alasan lain menyebutkan kalau Tsalits-Fahami merupakan alumni dari Pondok Pesantren Sunan Drajat, sehingga dukungan kuat untuk pasangan ini pun semakin mantap. Terjadinya pengarahannya untuk membentuk partisipasi politik santri ini, dapat dicermati dari kutipan wawancara orang kepercayaan pengasuh berikut:

"... ..Sebenarnya abah tidak menyuruh secara langsung untuk memilih calon siapa karena banyak calon yang sowan ke abah, hanya saja abah memberikan instruksi pada pengurus untuk mengkondisikan santri... .."12

Di samping itu juga wawancara dengan santri pengurus pondok putri yang bernama nada sebagai informan:

¹⁰ PPK di kecamatan Paciran tahun 2010

¹¹ Wawancara dengan santri putra Pondok Pesantren Sunan Drajat, Sabtu, 18/ 12/ 2010

¹² Abah yaitu panggilan santri untuk Abdul Ghofur selaku pengasuh dan pemegang kekuasaan utama di Pondok Pesantren Sunan Drajat.

“Selain saya mengikuti pilihan abah, sebenarnya saya sendiri juga sudah mengenal pak Tsalits waktu dulu menjadi dosen saya mbak. Saya mengenal sosoknya yang saya rasa memang pantas untuk menjadi pemimpin.”¹³

Atau dapat pula disimak petikan wawancara berikut dengan santri yang lain, yaitu Riska:

*"Saya cuma ikutan pilihan abah mbak, saya sendiri juga nggak begitu tau dengan politik-politik. Jadi apa yang didawuhkan abah ya saya manut saja mbak."*¹⁴

Selain wawancara di atas, terdapat pula petikan wawancara dengan salah satu santri putra, Ahmad:

*"Saya sendiri masih melihat calon-calonnya siapa mbak, tetapi berhubung saya ini santri ya saya hanya mengikuti apa yang didawuhkan abah. Karena saya meyakini kalau pilihan abah itu sudah benar."*¹⁵

Dari petikan wawancara di atas, santri tersebut meyakini kalau pilihan Kyai sudah benar, dalam artian Abdul Ghofur mempunyai sesuatu atau ciri-ciri luar biasa yaitu kharisma yang mampu mengehegemoni santri. Dan pada akhirnya dari 1152 santri yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa memenangkan calon pasangan Tsalits Fahami-Subagio di wilayah kelurahan

¹³ Wawancara dengan santri pengurus pondok putri Sunan Drajat, Sabtu, 18/ 12/ 2010

¹⁴ Wawancara dengan santri putri Pondok Pesantren Sunan Drajat, Sabtu, 18/ 12/ 2010

¹⁵ Wawancara dengan santri putra Pondok Pesantren Sunan Drajat, Sabtu, 18/ 12/ 2010

Banjarwati yang memang menjadi instruksi pengasuh. Dan dapat dikatakan angka partisipasi santri cukup tinggi karena tidak ada angka yang menunjukkan golongan putih (golput). Secara teoritik golongan putih (golput) merupakan partisipasi tidak aktif berupa tindakan masyarakat dalam pemilu. Tetapi di pondok pesantren Sunan Drajat memberikan partisipasi politik yang cukup baik dalam mengapresiasi bentuk partisipasi mereka dengan memberikan suara langsung dalam pemilu Kepala Daerah Lamongan tahun 2010.

2. Pengaruh Kyai yang dalam hal ini KH. Abdul Ghofur yang ada di Pondok Pesantren Sunan Drajat memberikan nuansa yang berbeda dalam pemilihan Bupati Lamongan tahun 2010. Calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tsalits Fahami-Subagio memperoleh kemenangan yang besar di TPS Pondok Pesantren Sunan Drajat. Kemenangan ini tidak lain karena dimotori oleh Abdul Ghofur yang secara tidak langsung menginstruksikan kepada para santri untuk memilih Tsalits Fahami-Subagio. Meskipun, sebenarnya beliau membebaskan para santrinya untuk memilih siapapun. Namun kharismatik dan kewibawaan dari Abdul Ghofur ini mementahkan para santri untuk menolak *wejangan* dari beliau. Hal ini sesuai dengan teori Otoritas tradisional dan kharismatik dari Max Webber. *Pertama*, teori otoritas tradisional menganggap pemimpin atas dasar tradisi, adat isitiadat, dan bahkan karena garis keturunan sehingga pantas untuk diikuti segala perintahnya. Abdul Ghofur merupakan salah seorang Kyai yang memiliki garis keturunan dengan Sunan Drajat yang merupakan salah seorang *Wali Songo* yang ada di tanah Jawa. *Kedua*, teori otoritas kharismatik yang menganggap bahwa seseorang layak diikuti karena kewibawaan yang ada dalam diri dan jiwanya. Abdul Ghofur ialah orang yang sangat *ta'dim* pada

agama Islam, berilmu pengetahuan agama yang tinggi, kesholihannya dan tingkah sopan lakunya yang membuat masyarakat menjadi segan kepada beliau. Khususnya kepada santri yang harus patuh dan taat kepada Kyai-nya agar mendapat berkah dikemudian hari. Pengaruh kultural dan kekharismanan dari Abdul Ghofur inilah yang membuat para santri menyatakan satu pilihan calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tahun 2010 sesuai dengan yang di *dawuhkan* oleh beliau.

B. Saran

1. Adapun saran dalam penelitian ini ialah bahwasannya sebagai warga negara Indonesia haruslah selalu menjunjung tinggi rasa demokrasi, khususnya dalam hal pemilihan umum untuk menentukan seorang pemimpin. Demokrasi merupakan harga mahal yang harus dituangkan dalam hak asasi sebagai warga negara Indonesia. Jangan sampai pengaruh luar ikut menggerus mental dan idealisme kita dalam menentukan hak suara.
2. Mengidolakan seorang tokoh merupakan sesuatu yang tidak dilarang. Jika tokoh tersebut juga ikut dalam peran politik untuk mengajak kepada satu kesefahaman dengan dirinya. Alangkah baik dan bijaknya jika kita yang mengikutinya juga berusaha untuk memahami dan mengetahui sendiri lebih dalam lagi. Jadi, tidak hanya sekedar mengikuti saja tanpa adanya background yang jelas di mata kita. Hal ini diperlukan untuk menumbuhkan kedewasaan berfikir politik sebelum membuat keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Khoirul & Salvina Vina. 2006. *Dasar Perilaku Politik dan kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004*, Malang: UMM Press.
- Ardial. 2010. *Komunikasi Politik*, Jakarta: Indeks, 2010.
- Arsip tentang profil pondok pesantren Sunan Drajat.
- Asrohah Hanun. *Pelebagaan Pesantren: Asal Usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Budiarjo Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Bustami Abd. Latif. 2006. *Kyai Politik: Politik Kyai*, Malang: Pustaka Bayan.
- Djaelani Abdul Qodir. 1994. *Peran Ulama dan Santri*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Feillard Andree. 1995. *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, bentuk dan Makna*, Jogjakarta: LKIS.
- <http://wikimapia.org/4101720/id/Pondok-Pesantren-Sunan-Drajat-Asrama-Putri>, 3/01/2011
- Huntington Samuel P. dan Nelson Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Maliki Zainuddin. 2003. *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik*, Surabaya: LPAM.
- Moleong Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulkhan Abdul Munir. 2009. *Politik Santri: Cara Menang Merebut Hati Rakyat*, Yogyakarta: Kanisius.

